



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.1.1 / K.18 / 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NO.100.3.3.1/K.398/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah ditetapkan dengan keputusan pimpinan lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Tahun 2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.1.1/K.398/2025, tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 namun dikarenakan masih terdapat pengajuan judul rancangan Peraturan Kepala Daerah yang akan dilakukannya Tahun 2026, maka perlu diubah Keputusan Gubernur dimaksud;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 100.3.3.1/K.398/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.398/2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, dengan daftar usulan judul Peraturan Gubernur sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.398/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

100.3.3.1/K.398/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 Februari 2026

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.18/2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.398/2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH /	JUDUL	ALASAN / MATERI POKOK PEMBENTUKAN	STATUS		WAKTU PENYELESAIAN	KET
	UNIT KERJA			BARU	UBAH / CABUT		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Menindaklanjuti atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	BARU	-	Tahun 2026	
2	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Bawah Tahun 2026	Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri	BARU	-	Tahun 2026	
3	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat yang tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri	Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri	BARU	-	Tahun 2026	
4	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2026	
5	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Kebertatan dan Banding Pajak Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
6	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
7	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Bagi Hasil Pajak Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
8	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Penagihan Pajak Daerah	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
9	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023	BARU	-	Tahun 2026	
10	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Tarif Detail Rincian Objek Retribusi Daerah pada SKPD/UPPD Pemungut Retribusi Daerah	Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2026	
11	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Penyesuaian Detail Rincian Objek pada BLUD	Amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024	BARU	-	Tahun 2026	
12	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan	Guna Menujuang Pemerintahan	BARU	-	Tahun 2026	
13	Badan Pendapatan Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah	UBAH	-	Tahun 2026	

14	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Pembentukan dan Usulan Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 78 dan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2024 tentang unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak mengamanatkan pembentukan unit pelaksana teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai unit pelaksana teknis daerah guna menyelenggarakan Pelayanan Terpadu dalam penanganan perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual	BARU	-	Tahun 2026	
15	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknik Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan. Perubahan ini bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Pelaksana Teknik Daerah Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dapat dijalankan lebih efektif, produktif, dan sesuai dengan standar terkini	UBAH		Tahun 2026	
16	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/436/M.SM.02.00/2025 perihal persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga perlu diubah	BARU	-	Tahun 2026	
17	Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim	Tata Cara Pemberian Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Berdasarkan Pengukuran Kinerja sebagai dasar dalam Penyusunan Pemberian atau Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai, Pergub Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Pergub Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah	BARU	-	Tahun 2026	

18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah	BARU	-	Tahun 2026	
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029	Bahwa Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang telah terbit untuk rentang waktu 2022-2026, harus disempurnakan kembali untuk disesuaikan dengan dinamika yang ada	BARU	-	Tahun 2026	
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana di Provinsi Kalimantan Timur					
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan lahan Tahun 2024					
22	DPMPTSP Prov. Kaltim	Rencana Umum Penanaman Modal Prov. Kaltim	Karena habisnya masa berlaku Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur berlaku dari Tahun 2014-2025 dan saat ini juga sedang ada perubahan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional sehingga perlu dilakukan pembuatan Peraturan Gubernur yang terbaru	BARU	-	Tahun 2026	
23	DPMPTSP Prov. Kaltim	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Daerah	Karena adanya revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	BARU	-	Tahun 2026	
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim	Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial	Perpustakaan merupakan wahana strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangan masyarakat modern, perpustakaan tidak hanya dipandang sebagai pusat informasi dan koleksi, melainkan juga sebagai ruang publik yang inklusif untuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan literasi, dan penguatan karakter bangsa. Melalui pendekatan berbasis inklusi sosial, perpustakaan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses pengetahuan, keterampilan, serta memperkuat kohesi sosial.	BARU	-	Tahun 2026	
			Adapun alasan yang melatar belakangi pembentukan peraturan gubernur atau urgensi perlunya regulasi adalah:				

			1. Saat ini program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial baru dilaksanakan melalui program / kegiatan yang bersifat teknis dan kebijakan non-normatif. Agar pelaku sanaanya berkesinambungan, menyeluruh, serta memiliki kepastian hukum, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Gubernur.				
			2. Peraturan ini akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dalam melaksanakan, mengevaluasi mengembangkan, program dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial secara terstruktur				
			3. Kehadiran regulasi juga memperkuat integrasi kebijakan lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan literasi, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah berkelanjutan.				
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim	Pedoman Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan	Perpustakaan adalah sarana penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Koleksi bahan perpustakaan merupakan jantung layanan perpustakaan yang menentukan kualitas informasi dan pengetahuan yang diterima masyarakat. Dengan pengembangan koleksi yang tepat, perpustakaan dapat menjamin tersedianya informasi yang relevan, mutakhir, beragam, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pedoman pengembangan koleksi perlu diatur secara khusus agar sejalan dengan nilai keadilan, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas SDM di Kalimantan Timur.	BARU	-	Tahun 2026	Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan Koleksi Bahan Perpustakaan menjadi instrumen penting untuk memastikan kualitas. Keberagaman, dan relevansi koleksi perpustakaan dalam mendukung literasi, pendidikan, penelitian, pelestarian budaya, serta pembangunan masyarakat Kaltim yang berdaya saing

18		Adapun alasan yang melatar belakangi pembentukan peraturan gubernur atau urgensi perlunya regulasi adalah: 1. Saat ini pengembangan koleksi bahan perpustakaan di tingkat provinsi masih bersifat teknis dan sporadis, belum memiliki landasan normatif yang terintegrasi. 2. Peraturan Gubernur diperlukan untuk menjadi pedoman resmi, agar pengembangan koleksi perpustakaan dapat dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan, serta berbasis kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. 3. Kehadiran Pergub akan memberikan kepastian hukum, memperkuat sinergi antarperangkat daerah, 4 serta menjamin optimalisasi pemanfaatan APBD/APBN maupun sumber pendanaan lainnya dalam pengembangan koleksi.					Peraturan Gubernur tentang Penyelamatan dan Pelestarian Naskah Kuno sangat urgent untuk memberikan kepastian hukum, arah kebijakan, serta jaminan keberlanjutan dalam menjaga warisan budaya daerah agar tetap lestari, bermanfaat dan diwariskan kepada generasi
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltim	Penyelamatan dan Pelestarian Naskah Kuno	Naskah kuno merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai luhur, pengetahuan, dan identitas sejarah yang sangat berharga. Naskah-naskah tersebut mendukung kearifan lokal, tradisi, serta pengetahuan yang mencerminkan peradaban dan perjalanan sejarah masyarakat Kalimantan Timur. Filosofi penyelamatan dan pelestarian naskah kuno didasarkan pada amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus menjaga kekayaan budaya daerah agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan adanya regulasi khusus, upaya penyelamatan tidak hanya bersifat insidental, melainkan menjadi kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan.	BARU	-	Tahun 2026	
			Adapun alasan yang melatar belakangi pembentukan peraturan gubernur atau urgensi perlunya regulasi adalah: 1. Saat ini penyelamatan dan pelestarian naskah kuno belum memiliki landasan normatif khusus di tingkat daerah, sehingga pelaksanaannya seringkali tidak terkoordinasi dan kurang optimal. 2. Peraturan Gubernur diperlukan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pihak terkait dalam melakukan inventarisasi, konservasi, digitalisasi, dan publikasi naskah kuno.				

			3. Regulasi ini juga akan memperkuat kepastian hukum mengenai pembagian peran, sumber 4 pelaporan, serta pendanaan, mekanisme pengawasan dalam upaya penyelamatan dan pelestarian naskah kuno.				
			4. Dengan adanya Pergub, naskah kuno tidak hanya dilestarikan secara fisik, tetapi juga dikembangkan sebagai sumber ilmu pengetahuan, media pendidikan, dan identitas budaya yang mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur.				
27	Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Prov. Kaltim Tahun 2025-2029	a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah; b. Untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengrusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan; c. Sebagai dasar penetapan kebijakan Kepala Daerah dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Tahun 2025 - 2029 di Provinsi Kalimantan Timur.	BARU	-	Tahun 2026	
28	Dinas Pekerjaan Umum , Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Provinsi Kaltim	Pengalihan Alur Sungai	Sesuai Pasal 13 huruf f Undang-Undang 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah provinsi bertugas menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota	BARU	-	Tahun 2026	
29	BPKAD Provinsi Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun 2026	Karena ada penyesuaian terhadap Kartu Inventaris Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	BARU	-	Tahun 2026	

30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Tata Cara Penyampaian dan Penelaahan Usulan Aspirasi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Penyusunan petunjuk teknis tata cara penyampaian dan penelaahan usulan aspirasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan turunan operasional dari pelaksanaan amanat Permendagri 86 tahun 2017 dalam lingkup penyusunan RKPD yang secara imlementatif mengatur mekanisme penyampaian (entri) usulan aspirasi serta penelaahan (verifikasi dan validasi) usulan aspirasi di dalam penyusunan RKPD. Penyusunan Peraturan Gubernur ini juga menindaklanjuti salah satu poin pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan saat Musrenbang RKPD Tahun 2026 dan rekomendasi Panitia Khusus Kamus Usulan RKPD Tahun 2025.	BARU	-	Tahun 2026	
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030	Pada pasal 5 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa GWPp menyusun dan menetapkan RAD TPB bersama bupati/wali kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya	BARU		Tahun 2026	
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur 2025-2030	1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi 2. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, khususnya pada Pasal 28 menyebutkan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim disusun dan ditetapkan pada lingkup Nasional dan Provinsi	BARU	-	Tahun 2026	
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur 2025-2030	1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Dalam Perda ini, disebutkan bahwa untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana aksi 2. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, khususnya pada Pasal 28 menyebutkan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim disusun dan ditetapkan pada lingkup Nasional dan Provinsi	BARU		Tahun 2026	

34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PGBPSDL)	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengankaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal. Pada Pasal 8 mengamanatkan bahwa "Dalam penyelenggaraan strategi nasional percepatan Pengankaragaman Pangan berbasis potensi sumber daya lokal dan untuk memenuhi target PPH secara nasional ditetapkan RAN-P3BPSDL" dan pada Pasal 9 mengamanatkan bahwa "Dalam rangka mendukung percepatan Pengankaragaman Pangan berbasis sumber daya lokal, Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan rencana aksi daerah				
35	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Pedoman Pengembangan Kompetensi Dalam Bentuk Pendidikan Formal Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini	BARU	-	Tahun 2026	
36	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Pendelegasian Wewenang Pendatarangan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, sehingga perlu ditinjau kembali.	BARU	-	Tahun 2026	
37	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.	-	UBAH	Tahun 2026	
38	Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim	Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK belum memiliki peraturan turunan terkait disiplin PPPK	BARU		Tahun 2026	
39	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim	Peta Jalan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Sebagai Sentra Transformasi Ekonomi	Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 2 ayat (1) tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan usaha kecil dan menengah	BARU	-	Tahun 2026	
40	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Pemprov Kaltim	Grand Desain Pembangunan Kependudukan 2025 - 2045	Menindaklanjuti Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045	BARU	-	Tahun 2026	
41	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 pada Pasal 65 dan Pasal 118	BARU	-	Tahun 2026	

42	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Mekanisme Pembagian Manfaat Dalam Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Hutan dan Lahan	Bahwa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2021 tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebijakan nasional, sistem nilai ekonomi karbon, serta persyaratan dan standar internasional dalam pelaksanaan Program Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Konsumen Nilai Ekonomi Karbon untuk pencapaian emisi NDC pengendalian emisi GRK. Korelasinya dengan Kalimantan Timur adalah potensi wilayah-wilayah berbasis unit manajemen/pengelolaan yang akan menjadi lokus dalam pelaksanaan nilai ekonomi karbon seperti perdagangan karbon seperti perdagangan karbon atau pembayaran berbasis kinerja lainnya, sehingga akan berdampak juga tentang bagaimana pendistribusian manfaatnya, dan perlu untuk menyusun Peraturan Kepala Daerah terbaru.	UBAH	-	Tahun 2026	
43	Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim	Pedoman Pemberian Remunerasi dan Honorarium Dewan Pengawas pada RSUD, Rumah Sakit Khusus, dan UPTD pada Dinas Kesehatan	Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Pegawai dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan dan kondisi saat ini, serta menyesuaikan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	BARU	-	Tahun 2026	
44	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah	Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi dan/atau Perjanjian Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu menyesuaikan pengaturan yang lebih rinci mengenai Tata Cara Permohonan Rekomendasi, mekanisme perjanjian pemanfaatan tanah, perhitungan dan pembayaran tarif pemanfaatan tanah, serta pemberian isentif dan keringanan tarif bagi pihak tertentu	BARU	-	Tahun 2026	
45	Dinas Perikanan & Kelautan Prov. Kaltim	Penyelenggaraan Pengawasan Sumber daya Kelautan Dan Perikanan	Dalam rangka menjaga kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan serta menegakkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan perlu adanya sistem pengawasan yang terpadu, efektif, dan terkoordinasi untuk diperlukan Peraturan Gubernur sebagai landasan hukum pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di tingkat daerah	BARU	-	Tahun 2026	

46	Dinas Perikanan & Kelautan Prov. Kaltim	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Derawan dan Perairan Sekitarnya		BARU	-	Tahun 2026	
----	---	---	--	------	---	------------	--

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

RUDY MAS'UD

